



STRATEGI PERTAHANAN LAUT INDONESIA MELALUI MODERNISASI ALUTSISTA TNI AL

Hendra Siregar, M. Achnaf

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut

hendra.siregar@tnial.mil.id

Abstrak. This research method uses a literature study with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using literature study. The data analysis technique of this research is interactive model of analysis which consists of three components of analysis, namely Milles and Huberman, namely reduction, presentation and conclusion. The results of the study stated that the modernization of the defense equipment system as an effort to carry out Indonesia's maritime defense strategy is an urgent matter considering the threat posed by the enemy is very dangerous. They are also modernizing their defense equipment. Foreign countries that can threaten the territory of Indonesia show the progress of their defense equipment. In addition, crimes in Indonesia's marine areas such as illegal fishing, piracy, terrorism, people smuggling also improve the quality of ships and their equipment so that they are not detected by patrols. Thus, Indonesia's maritime defense strategy cannot be separated from efforts to modernize the Indonesian Navy's defense equipment. The government through the Ministry of Defense must design the modernization of the defense equipment system by taking at least three strategies or policies, namely the budget strategy, investment strategy, and procurement strategy.

Kata kunci: Modernization, Defense Strategy, Qualitative Approach

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Luas wilayah Indonesia sebesar 1.904.569 km, dengan garis pantai 54.716 km. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia yang akan membangkitkan semangat kebaharian, memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim, serta memberikan peluang positif dalam meningkatkan perekonomian nasional berkelanjutan dan pertahanan negara (Sartono & Prakoso, 2020).

Namun untuk mengekstraksi harapan-harapan tersebut menjadi nyata, maka Indonesia memerlukan sistem dan strategi pertahanan laut yang mumpuni. Pertahanan maritim dibutuhkan untuk menjawab ancaman nyata kemaritiman yang bisa datang dari mana saja dan dalam bentuk apa saja. Beberapa ancaman kemaritiman yang telah dan mungkin akan dihadapi oleh Indonesia, yakni terorisme dan radikalisme, wabah penyakit, bencana alam, perompakan dan pembajakan, pencarian sumber daya alam di laut, serangan siber dan spionase, penyalahgunaan dan penyebaran narkoba, penyelundupan di laut, ancaman terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran, separatisme, dan pemberontakan bersenjata. Selain itu, ada juga ancaman belum nyata berupa konflik terbuka atau perang konvensional yang berasal dari luar negeri dalam bentuk invasi militer, infiltrasi, dan sabotase yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan nasional (Fatimah, Prakoso, & Sudiarmo, 2021).

Ancaman terhadap Kepentingan Nasional di Bidang Maritim Menurut Barry Buzan, ancaman terhadap keamanan negara dapat berbentuk (Arto, Prakoso, & Sianturi, 2019):

1. Ancaman militer, yang berpotensi merusak berbagai komponen negara bahkan negara itu sendiri secara total;
2. Ancaman terhadap ideologi, yang termasuk dalam kategori ancaman berdimensi politik;
3. Ancaman di bidang ekonomi, seperti: embargo, pembatasan ekspor dan impor barang, pencurian sumber daya alam, penghentian pasokan bahan-bahan penting;
4. Ancaman di bidang lingkungan atau ekologi, seperti bencana alam, polusi, dan lain-lain

Dari temuan di lapangan, kawasan perairan Indonesia dewasa ini rawan dari implikasi konflik di kawasan serta berbagai bentuk kejahatan transnasional kapal, serta *illegal fishing*, bersama-sama dengan ancaman keamanan yang datang dari intervensi asing dibahas sesudahnya, mengingat wilayah yang terkena dampak bersifat lebih terbatas merupakan ancaman keamanan yang cukup sering terjadi dan juga kian potensial merusak stabilitas keamanan (perairan) Indonesia (Harris, Prakoso, & Sianturi, 2019).

Sistem pertahanan maritim Indonesia selama ini sudah dibebankan dan menjadi kewajiban Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). TNI secara umum memang merupakan komponen utama sistem pertahanan negara adalah memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7, Ayat 2, Huruf b, Angka 8. Sedangkan salah satu tugas TNI AL sebagai bagian dari TNI adalah melaksanakan Dawilhanla sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Tugas TNI AL, Pasal 9, Huruf e.

Namun untuk memenuhi tugas dan kewajiban TNI AL dalam menjaga laut Indonesia, tentunya dibutuhkan berbagai macam strategi pertahanan yang komprehensif. Pertahanan negara dapat dianggap sebagai sebuah sistem. Inputnya terdiri atas TNI dan rakyat (*man*), Alutsista dan teknologi (*machine* dan *material*), anggaran (*money*), strategi (*method*), informasi dan energi. Sedangkan *output system* adalah rasa aman, keselamatan seluruh bangsa, keamanan segala sumber daya serta kedaulatan wilayah NKRI. *Outcome*-nya adalah kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan (Sutanto, 2021).

Tujuan dari penelitian ini mengkaji strategi pertahanan laut melalui modernisasi alutsista TNI AL. Kajian ini akan membantu dalam menghubungkan masalah strategi keamanan Laut Indonesia melalui upaya melakukan modernisasi alutsista TNI AL

METODE

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan adalah melakukan pendalaman data-data berdasarkan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Teknik analisa

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa Milles dan Huberman :

- a. Reduksi data (*reduction data*), yakni data yang diperoleh di lokasi penelitian/data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
- b. Sajian data (*data display*), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

Teknik penyajian data dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan kondisi pertahanan laut Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pertahanan laut Indonesia

Strategi pertahanan negara harus dapat mencakup bagaimana cara mencapai tujuan keamanan dari suatu negara untuk menghadapi musuh yang akan mengancam *security* dari negara. *Security* atau keamanan sendiri adalah konsep yang digunakan untuk menghadapi ancaman. *Security* adalah tentang kelangsungan hidup, dimana suatu isu dihadirkan sebagai sesuatu yang dapat memberikan *existential threat* kepada *referent object*. Secara tradisional, konsep ini mempunyai dua arti pokok, yaitu kebebasan dari resiko atau bahaya, serta kebebasan dari keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan. Selain hal diatas, satu konsep berikutnya yang dapat digunakan untuk dapat menganalisa pembuatan strategi pertahanan negara yang baik adalah konsep *grand strategy*. Peran *grand strategy* menurut Liddel Hart adalah mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh sumber daya bangsa untuk dapat mengenali ancaman yang ada, baik itu ancaman yang berasal dari lingkungan luar (*threat*), atau ancaman yang berasal dari lingkungan nasional (*vulnerabilities*). Identifikasi terhadap sumber-sumber ancaman tersebut kemudian dapat menjadi suatu acuan dalam merumuskan strategi pertahanan suatu negara yang tepat (Manggala, 2016).

Modernisasi alutsista TNI AL

Strategi anggaran

Proses untuk menyusun strategi pertahanan negara memang tidak mudah, karena harus mempertimbangkan keseluruhan aspek dari setiap kepentingan Nasional dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbagai kebijakan pertahanan telah dilakukan untuk menyempurnakan perkembangan di lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan yang digunakan Indonesia untuk bidang pertahanan disebut dengan kebijakan MEF (*Minimum Essential Force*) atau Kekuatan Pokok Minimum yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dan memenuhi obyek-obyek dari pertahanan negara.

Kebijakan ini merupakan sebuah reformasi atas kebijakan pertahanan yang sudah ada dan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. MEF ini dibagi ke dalam tiga periode yaitu Rencana Strategis (yang selanjutnya akan disebut sebagai Renstra) Renstra I (2009-2014), Renstra II (2015-2019), dan Renstra III (2020-2024).

Kebijakan MEF terus dilanjutkan pada era Presiden Jokowi. MEF bisa dikatakan sebagai alternatif yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan karena memiliki perencanaan yang cukup baik dalam berbagai aspek, termasuk juga kebijakan yang menyangkut kesejahteraan prajurit TNI AL pun menjadi fokus agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. MEF ini juga memuat strategi anggaran pertahanan negara dapat digunakan semaksimal dan seefektif mungkin sesuai dengan porsinya masing-masing.

Keterbatasan keuangan negara dan dinamika lingkungan strategis, mengakibatkan banyak perubahan kebutuhan, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai macam kebijakan untuk melakukan reformasi anggaran sehingga dapat digunakan secara strategis. Anggaran pertahanan TNI mengalami kenaikan cukup besar mencapai 400%, yaitu dari 2004 anggaran untuk TNI sekitar Rp 21,4 triliun, kini seiring meningkatnya perekonomian nasional alokasi dana untuk TNI mencapai Rp 84,4 triliun (Ahmadi, Wirjodirdjo, & Maulana, 2015).

Rencana anggaran pengadaan Alutsista untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan TNI yang dirancang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2005-2009 sebesar USD 3,769,650,000, dimana sebesar USD 3,547,450,000 dibiayai dari Fasilitas Kredit Ekspor (FKE), sedangkan sisanya dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Karena perubahan kewenangan untuk penetapan Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP), Alokasi FKE yang dirancang dalam waktu 5 tahun, hanya ditetapkan 4 kali, pada tahun 2005, 2006, 2008, dan 2009 sebesar USD. 3,234,950,000. Capaian daya serap uang muka dan pinjaman luar negeri selama Renstra 2005-2009 rata-rata hanya sebesar 46% (Sudarmanto & Sudibyakto, 2011).

Anggaran pertahanan pada tahun 2010 mengalami kenaikan 27,8% dibanding tahun sebelumnya sedangkan anggaran 2011 sebesar \$ 6,5 miliar dollar. Realisasi anggaran pertahanan Indonesia selama periode 2010-2019 tumbuh rata-rata 11,8 persen per tahun atau naik dari Rp42,4 triliun pada 2010 menjadi Rp115,4 triliun pada 2019. Rata-rata realisasi anggaran AL sebesar 16 persen atau Rp13,8 triliun per tahun, AD 44 persen atau Rp38 triliun per tahun dan AU hanya 13 persen per tahun. Bila dilihat dari sisi pertumbuhan realisasi anggaran, anggaran TNI AU relatif tumbuh lebih tinggi sebesar 13,58 persen atau 11,4 triliun per tahun, diikuti AL 12,85 persen per tahun dan AD 12,63 persen (Mujiburrahman & Effendi, 2021). Pada tahun 2014 anggaran pertahanan TNI mengalami pemangkasan sebesar Rp. 10,508 triliun. Hal ini akan mempengaruhi kesiapsiagaan TNI di tanah air yang meliputi kekuatan di perbatasan maupun operasional TNI keseluruhan (Ahmadi, Wirjodirdjo, & Maulana, 2015).

Pada tahun 2021 Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menggelontorkan Rp 9,3 miliar untuk pengadaan alutsista pada 2021. Tercatat, jumlah anggaran alutsista tertinggi yakni untuk matra laut sebesar Rp 3,7 triliun. Dana tersebut akan digunakan oleh TNI AL untuk pengadaan kapal patroli cepat, dan peningkatan pesawat udara matra laut. Selanjutnya, sebanyak Rp 2,6 triliun digunakan oleh TNI Angkatan Darat (AD) untuk pengadaan material dan alutsista strategis. Terakhir, sebanyak Rp 1,9 triliun digunakan oleh TNI Angkatan Udara (AU) untuk pengadaan Penangkal Serangan Udara (PSU) dan material pendukung (Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2022).

Strategi investasi

Alternatif lain yang bisa dilakukan dalam rangka membangun strategi pertahanan maritim Indonesia adalah dengan melakukan strategi investasi. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk

menanggulangi kelemahan dana Indonesia dalam memajukan kekuatan SDM dan Alutsista TNI AL yang dapat memiliki daya saing tinggi dengan negara-negara lainnya yang terus mengeluarkan kebijakan peningkatan anggaran pertahanan negaranya masing-masing.

Negara di kawasan regional Asia tenggara pada tahun 2008 telah meningkatkan anggaran pertahanan melebihi 1% hingga 6%. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura anggaran pertahanan mencapai 7,6% dari PDB, Malaysia memiliki anggaran pertahanan 2,2%, Thailand memiliki anggaran pertahanan 1,9%. Filipina memiliki anggaran pertahanan 1,1%. Kebijakan pertahanan dan alutsista sangat memerlukan dukungan anggaran yang rasional. Dengan alokasi anggaran kurang dari 1% PDB sangat sulit untuk membangun kekuatan pertahanan yang memadai (Iskandar, 2014).

Aspek dimensi luar negeri yang bisa faktor pendorong dalam mencapai MEF antara lain kerjasama pertahanan. Sebagai Negara yang memainkan peranan penting di Asia Tenggara Indonesia selalu aktif menggalang kerjasama dengan Negara tetangga tujuan untuk membicarakan persoalan yang sifatnya mengancam dan melihat kemampuan pertahanan serta berbagi pengalaman dalam menghadapi masalah ataupun ancaman. Kerjasama alih teknologi yang dilakukan Indonesia dengan beberapa Negara dalam bidang pertahanan bertujuan untuk kemandirian dalam memproduksi serta memperbaiki alutsista yang dimiliki. Tujuan lainnya adalah penghematan anggaran dalam membangun kekuatan pertahanan. Pinjaman luar negeri merupakan sebuah alternatif dalam memenuhi anggaran pertahanan mengingat masih banyak pos-pos lain yang membutuhkan dana APBN yang lebih diutamakan. Pinjaman luar negeri dapat di jadikan pilihan dalam menutupi kebutuhan dana yang mendesak (Iskandar, 2014).

Tantangan pertahanan pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan akan lebih kompleks. Wilayah Indonesia yang sangat luas, yakni sekitar 8 juta kilometer persegi, serta karakteristik geografi sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau dengan wilayah maritim yang luasnya hampir 6 juta kilometer persegi membutuhkan alokasi anggaran pertahanan yang proporsional dengan tingkat risiko yang dihadapi. Dengan alokasi anggaran pertahanan di bawah 1% dari PDB menjadi tantangan yang tidak mudah dalam penyelenggaraan pertahanan dalam mengawal NKRI. Untuk menghadapi tantangan tugas pertahanan tersebut, pembangunan pertahanan diprioritaskan pada pembangunan kekuatan dan peningkatan profesionalisme prajurit dengan ketersediaan Alutsista yang mampu mendukung kesiap-siagaan dan mobilitas dalam konteks tersebut, Kekuatan Pokok Minimum mendesak realisasinya. Untuk mewujudkan Kekuatan Pokok Minimum tersebut, proyeksi anggaran pertahanan dalam dua sampai tiga tahun yang akan datang diharapkan dapat berada di atas 1% dari GDP dan meningkat secara bertahap dalam 10 tahun yang akan datang (Iskandar, 2014).

Industri pertahanan adalah industri baik milik negara maupun swasta nasional yang mampu atau berpotensi secara sendiri-sendiri atau berkelompok untuk sebagian dan seluruhnya, menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan serta jasa pemeliharaan guna memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) seperti PT. DI, PT. PINDAD, PT. PAL dan PT. LEN dilibatkan dan ditingkatkan produktivitasnya dalam menyokong Pembangunan MEF. Ini akan menjadi program yang berkelanjutan menuju terwujudnya Postur Ideal TNI.

Strategi pengadaan alutsista

Pertahanan negara atau pertahanan nasional adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara dan keselamatan suatu bangsa dari ancaman dan gangguan yang ada baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman yang ada dapat bersifat militer maupun non militer. Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut.

Tujuan utama pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Untuk menjamin amanat konstitusi ini, pemerintah RI sejak awal kelahirannya secara bertahap terus mendorong peningkatan postur pertahanan dan mempercepat modernisasi alutsista TNI termasuk alutsista TNI AL. Hal ini dilakukan agar kekuatan yang dimiliki mampu menghadapi berbagai ragam ancaman baik tradisional maupun non tradisional termasuk melakukan peperangan modern yang sarat dengan teknologi canggih.

Kondisi alutsista TNI yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua (25 sampai dengan 40 tahun) berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Kondisi TNI baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana termasuk Alutsista masih jauh untuk menjadi postur pertahanan negara dalam kebutuhan MEF dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk (Iskandar, 2014).

Kebijakan modernisasi alutsista tertuang dalam Permenhan No. 19 Tahun 2012 tentang *Minimum Essential Force* (MEF). Dalam Kebijakan MEF terdapat empat unsur pembangun yaitu: Rematerialisasi, Pengadaan, Revitalisasi dan Relokasi. Hingga akhir MEF tahap II (2015-2019), MEF TNI AL masih di bawah 50 persen dari postur ideal alutsista AL (Mujiburrahman & Effendi, 2021).

Kemampuan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjamin terwujudnya keamanan dan tegaknya kedaulatan negara di laut serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkait erat dengan kualitas dan kuantitas dari alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimilikinya. Tingkat kemuktahiran teknologi alutsista yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara menjadi indikator akan kemampuannya dalam melindungi dan menjamin keamanan serta kedaulatan negara. Oleh sebab itu alutsista selain sebagai alat pertahanan negara juga mengandung faktor penggentar (*deterrence*). Kehadiran alutsista utamanya di wilayah-wilayah perbatasan menjadi unsur penegas kedaulatan NKRI.

Alutsista yang memperkuat jajaran Armada TNI AL pada awalnya merupakan bekas pakai (*second-hand*) eks AL Belanda, seperti tank M4A3 Sherman, kendaraan tempur pendarat amfibi (LVTH, LVTP dan DUKW), kapal perang jenis korvet (RI Radjawali, RI Hang Tuah, RI Pati Unus dan RI Banteng) dan jenis perusak (RI Gajah Mada), lalu kapal-kapal penyapu ranjau dan patroli, sejumlah kapal angkut dan pendarat (LST dan LCI), serta pesawat patroli maritim jenis UF-2 Albatross. Perkembangan paling signifikan di periode awal modernisasi alutsista ditandai dengan kedatangan empat kapal perang baru buatan Ansaldo, Leghorn, Italia, yaitu fregat RI Imam Bondjol, RI Untung Surapati serta korvet RI Pattimura dan RI Sultan Hasanuddin. Keempatnya memperkuat jajaran Armada TNI AL sejak tahun 1958. Lalu sejak tahun 1959 secara bertahap alutsista modern asal Uni Soviet masuk memperkuat jajaran TNI AL. Antara kurun waktu tahun 1960 sampai 1970 TNI AL telah tumbuh sebagai kekuatan pertahanan negara di laut yang lengkap. Memasuki akhir periode 1980-an, TNI AL berupaya melakukan pengadaan alutsista hasil produksi dalam negeri. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, PT PAL menjalin kerja sama dalam kerangka alih teknologi (*transfer of technology/ToT*) dengan Lürssen Werft dari Jerman Barat untuk merancang kapal perang jenis Fast Patrol Boat-57 Van Speijk dari Belanda, kapal selam kelas U-209/1300 dari Jerman Barat, fregat kelas Tribal dari Inggris serta korvet kelas Ki Hadjar Dewantara dari Yugoslavia. Meskipun sebagian alutsista telah menjalani serangkaian modernisasi dan penggantian mesin, namun hasil yang diharapkan tidak berjalan maksimal. Keterbatasan anggaran untuk MLM (*mid life modernization*) dan repowering telah menyebabkan banyak alutsista TNI AL yang mangkrak atau tidak mampu lagi beroperasi secara penuh (Redaksi, 2014).

Kebijakan modernisasi alutsista tertuang dalam Permenhan No. 19 Tahun 2012 tentang *Minimum Essential Force* (MEF). Dalam Kebijakan MEF terdapat empat unsur pembangun yaitu: Rematerialisasi, Pengadaan, Revitalisasi dan Relokasi. Hingga akhir MEF tahap II (2015-2019), MEF TNI Angkatan Laut (AL) masih di bawah 50 persen dari postur ideal alutsista AL.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan, Kemenhan 2018), capaian alutsista AL berupa KRI hanya 161 unit dari postur ideal 261 unit (61 persen). Sedangkan kapal selam hanya 5 unit dari postur ideal 12 unit (42 persen), pesawat udara hanya 85 unit dari postur ideal 160 unit (53 persen). Sementara kendaraan tempur (ranpur) marinir hanya 503 unit dari postur ideal 1.481 unit (34 persen). Berdasarkan data yang dirilis oleh Global Firepower (2020), kekuatan armada AL Indonesia berada pada peringkat ke 10 dunia. Sedangkan di kawasan ASEAN, kekuatan armada angkatan laut Indonesia berada pada posisi kedua setelah Thailand (Mujiburrahman & Effendi, 2021). Hingga 2021, Indonesia memiliki 5 kapal selam, 7 kapal pengawal (*frigates*), 24 kapal korvet dan 179 kapal patroli. Dari lima kapal selam, tiga relatif masih baru yaitu Kapal Selam KRI Nagapasa 403 beroperasi pada 2017, KRI Ardadeli 404 beroperasi 2018 dan KRI Alugoro 405.

Dampak modernisasi alutsista TNI AL terhadap pertahanan laut Indonesia

Modernisasi alutsista AL menjadi sangat penting, tidak saja dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah dan kekayaan maritim Indonesia, akan tetapi juga untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim bagi seluruh kapal Indonesia maupun kapalkapal negara lain yang berlayar melalui perairan laut Indonesia. Hingga saat ini, beberapa ancaman dan gangguan keamanan laut Indonesia antara lain pencurian sumber daya alam, perompakan, terorisme, perdagangan manusia serta sengketa perbatasan termasuk konflik Laut Cina Selatan atau LCS.

Adanya Modernisasi Alutsista TNI AL yang kuat maka pertahanan laut Indonesia semakin kuat. TNI AL dengan Alutsitanya yang modern akan mampu mengatasi ancaman dan gangguan di wilayah Laut berikut ini :

1. Pencurian sumber daya alam,

Alutsista yang canggih dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman atas pencurian sumber daya alam yang tersebar di wilayah laut Indonesia. TNI AL dapat secara rutin menjalankan pengamanan dari pencurian sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab secara akurat. Selain itu, TNI AL melalui alutsista yang canggih dapat melaksanakan verifikasi titik referensi dan *re-survey* titik dasar untuk menentukan wilayah NKRI. Operasi survei hidrografi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ini dilakukan untuk menetapkan Titik Dasar dan Garis Pangkal.

2. Perompakan,

Perompakan di wilayah lauh Indonesia dapat terjadi sewaktu-waktu yang mengancam wilayah laut Indonesia. Melalui dukungan alutsista yang memadai maka wilayah laut Indonesia dapat diamankan dari para perompak yang akan mengganggu aktivitas di jalur laut Indonesia.

3. *Illegal Fishing*

Patroli Keamanan Laut menghadirkan kapal-kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, termasuk di pulau-pulau terpencil, selain dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut juga untuk mencegah terjadinya *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan berbendera asing. Dengan kapal patroli yang memadai maka TNI AL mampu bergerak cepat untuk menindak kapal-kapal nelayan yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia.

4. Terorisme

Wilayah laut merupakan pintu masuk bagi kejahatan terorisme. penyelundupan senjata atau tempat untuk lalu lintas logistik guna mendukung aktivitas terorisme. Oleh karena itu, mutlak dibutuhkan sebuah upaya untuk mencegahnya dengan pengamanan wilayah laut yang ketat, yang dapat menghambat aktivitas terorisme dengan memanfaatkan wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Tanpa dukungan alutsista yang memadai maka teroris akan leluasa menjalankan aksinya.

5. Perdagangan manusia

Wilayah laut Indonesia juga dimanfaatkan untuk melancarkan kejahatan transnasional berupa perdagangan manusia. Manusia diselundupkan melalui jalur laut. karena perlu armada yang canggih melalui Patroli keamanan laut yang canggih dengan yang mampu menjangkau pulau-pulau terpencil terluar di wilayah Indonesia yang berpotensi menjadi tempat penampungan orang-orang yang akan diselundupkan ke luar negeri. Perdagangan manusia merupakan kejahatan korporasi internasional yang juga didukung oleh dana dan peralatan yang memadai dalam menyelundupkan manusia. Mereka memiliki dukungan kapal-kapal yang layak beroperasi di lautan. Oleh karena, itu TNI AL juga harus memiliki kapal patroli yang lebih canggih.

6. Sengketa perbatasan termasuk konflik Laut Cina Selatan atau LCS.

Kecanggihan armada kapal perang RI (KRI) di seluruh perairan Indonesia, harus dimiliki untuk mempertahankan dan menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (*deterrence effect*). Saat ini ada beberapa wilayah Indonesia yang diklaim menjadi wilayah sengketa, khususnya di Laut Cina Selatan. Tanpa dukungan armada kapal dan alutsista lain yang modern, canggih dan memadai maka sulit untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Negara asing khususnya China senantiasa melakukan *show of force*, untuk memnunjukkan kekuatan armada kapal dan kecanggihan persenjataannya di wilayah perbatasan laut Indonesia, jika tidak diimbangi maka hal ini akan membuat China semakin berani masuk ke wilayah Laut Indonesia.

PENUTUP

Melalui paparan di atas dapat dinyatakan bahwa guna menjalankan strategi pertahanan laut Indonesia dapat dilakukan dengan menjalankan modernisasi alutsista TNI AL. Sebab, aktor utama yang memiliki tugas dan wewenang di wilayah laut dalam rangka mempertahankan wilayah Laut Indonesia adalah TNI AL. Dengan kebijakan modernisasi alutsista berarti memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan TNI AL dalam mempertahankan wilayah laut Indonesia.

Modernisasi alutsista sebagai upaya menjalankan strategi pertahanan laut Indonesia merupakan hal yang urgen mengingat ancaman yang diberikan musuh sangat berbahaya. Mereka juga melakukan modernisasi alutsistanya. Negara-negara asing yang dapat mengancam wilayah Indonesia menunjukkan kemajuan lautsistanya. Selain itu, kejahatan-kejahatan di wilayah laut Indonesia seperti penangkapan ikan ilegal, perompakan, terorisme, penyelundupan manusia juga meningkatkan kualitas kapal dan peralatannya agar tidak terdeteksi oleh patroli TNI AL. Dengan demikian, strategi pertahanan laut Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk melakukan modernisasi alutsista TNI AL. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan harus merancang modernisasi Alutsista dengan setidaknya menempuh tiga strategi atau kebijakan yaitu strategi anggaran, strategi investasi, dan strategi pengadaan.

REFERENSI

- Ahmadi, Wirjodirdjo, B., & Maulana, A. (2015). Analisa Pemilihan Alutsista TNI AL dengan Metode Life Cycle Cost (LCC) dan Analytic Network Process (ANP) (Studi Kasus Kapal Layar Latih). *Jurnal Analisis Sistem & Riset Operasi*.
- Arto, R. S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*.



- Fatimah, A., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*.
- Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut Dalam Rangka Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*.
- Iskandar, N. (2014). Strategi Modernisasi Militer Indonesia dalam Penyeimbangan Kekuatan Militer dengan Negara-Negara di Asia Tenggara tahun 2004-2014. *JOM FISIP*.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (2022, Februari 21). *Kementerian Keuangan (Kemenkeu)*. Retrieved from Anggaran Modernisasi Alutsista TNI 2021 Terbesar untuk Matra Laut: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/anggaran-modernisasi-alutsista-tni-2021-terbesar-untuk-matra-laut>,
- Manggala, P. U. (2016). Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas*.
- Mujiburrahman, & Effendi, S. A. (2021). Urgensi Percepatan Modernisasi Alutsista TNI AL. *Jurnal Politik dan Keamanan Budget Issue Brief*.
- Redaksi. (2014). Alutsista Kebanggaan TNI Angkatan Laut dari Masa-ke Masa. *Info Historia, Buletin Sejarah TNI AL dan Kemaritiman*.
- Sartono, & Prakoso, L. Y. (2020). Impresi dan Otoritas Pemerintah Indonesia dalam Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 231-256.
- Sudarmanto, A., & Sudibyakto, H. A. (2011). Implementasi Kebijakan Pengadaan Alutsista untuk Mendukung Kebutuhan Operasional Tentara Nasional Indonesia (Studi tentang Pengadaan Alutsista Renstra 2005-2009). *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Sutanto, R. (2021). Dinamika Alutsista TNI AL Komponen Utama Kekuatan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*.